

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pergerakan di bidang ilmu pengetahuan dan inovasi data telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara pandang dan cara hidup masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan aktivitasnya. Kemajuan mekanis menentukan keputusan yang tak terhitung jumlahnya untuk membuat pertukaran moneter. Data akan menjadi informasi yang diurus menjadi struktur yang lebih berharga dan signifikan bagi penerimanya, sumber data tersebut akan menjadi informasi. Salah satu data yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah data pembukuan.<sup>1</sup>

Kebutuhan data untuk organisasi merupakan persyaratan mendasar untuk organisasi, dimana data tersebut terdapat dalam kronik organisasi. Meningkatnya persyaratan untuk data mendukung cara paling umum untuk mencapai tujuan dalam sebuah asosiasi.<sup>2</sup> Informasi Pembukuan diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu direktur melakukan pekerjaan eksekutif sehingga tujuan hierarkis dapat dicapai. Jadi, data pembukuan yang diberikan oleh otoritas publik harus digunakan untuk memutuskan strategi yang terkait dengan persiapan dan pengendalian moneter lokal.

Sistem merupakan bermacam-macam bagian yang menyusun satu kesatuan. Dengan cara ini, sistem yang baik akan benar-benar ingin menangani transaksi berturut-turut bahkan dalam jumlah besar dan dapat membatasi risiko kesalahan. Organisasi bergantung pada sistem informasi untuk memberikan data agar sesuai dengan kapasitas mereka untuk bersaing.<sup>3</sup>

Sistem informasi pembukuan adalah bagian otoritatif yang mengumpulkan, mengatur, memproses, menyelidiki, dan menyampaikan data

---

<sup>1</sup>Evi Triandini et al., "Metode Systematic Literature Review Untuk Identifikasi Platform Dan Metode Pengembangan Sistem Informasi Di Indonesia," *Indonesian Journal of Information Systems* 1, no. 2 (2019).

<sup>2</sup>Simarmata, Janner, et. al, *Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi, Konsep Dasar Manajemen Sistem Informasi* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020).

<sup>3</sup>Cekotechnology, "Pengertian Sistem Informasi Dan Contoh Sistem Informasi," *Jasa Pembuatan Aplikasi, Desain, Sistem Informasi, Website dan Bidang IT Lainnya* (2019).

keuangan yang signifikan untuk pengambilan keputusan ke pertemuan luar seperti tinjauan biaya, pendukung keuangan, dan pemberi pinjaman serta pertemuan dalam, terutama manajemen. Untuk dapat menjalankan sistem pembukuan secara ideal, suatu unsur dapat memanfaatkan kerangka data yang saat ini dipegang oleh komputer agar sistem pembukuan dapat berjalan dengan baik (berhasil dan produktif) sehingga data keuangan yang dimasukkan dapat lebih bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pemerintah kota adalah penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan yang bersifat umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapasitas Pemerintah Desa untuk menjadi yang paling terdepan dalam menyelesaikan kemajuan di segala bidang, baik di bidang pemerintahan, pembangunan, daerah dan usaha bantuan yang merupakan kemajuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang meliputi kehidupan individu dan kerja.<sup>5</sup>

Peran besar yang diambil pihak desa ini jelas disertai dengan kewajiban yang luar biasa. Oleh sebab itu, pemerintah desa wajib memiliki pilihan untuk menerapkan standar tanggung jawab dalam administrasinya, di mana segala macam gerakan menuju akhir pelaksanaan pemerintah kota harus bertanggung jawab kepada daerah kota sesuai dengan pengaturan.<sup>6</sup> Meski demikian, pekerjaan dan komitmen yang didapat oleh kota belum diimbangi dengan SDM (SDM) yang memuaskan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Batasan normal lainnya adalah bahwa kota tersebut belum memiliki strategi dan dukungan untuk tempat kerja dalam organisasi keuangan dan daerah tersebut masyarakatnya belum kritis atas pengelolaan anggaran desa dan anggaran belanja.

Inovasi data yang dikembangkan lebih lanjut saat ini bekerja dengan menyebarkan informasi ke berbagai kabupaten, bahkan informasi menyebar

---

<sup>4</sup>Faiz Zamzami, *et. al*, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2021), h.3.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<sup>6</sup>Ilham Zitri, "Akuntabilitas Pemerintahan Desa Benete Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)," *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 3, no. 2 (2020).

dengan cepat ke seluruh wilayah dunia. Pemanfaatan inovasi data, untuk keadaan sekarang ini penggunaan PC, dapat membantu cara paling umum dari data event sosial dengan menyebar lebih cepat dan tepat.<sup>7</sup> Tapi saat ini memang belum terdapat peraturan khusus yang mengharuskan untuk melakukan komputersasi akuntansi, hal tersebut dilakukan untuk melengkapi komponen-komponen sistem informasi akuntansi yaitu salah satunya adalah infrastruktur teknologi informasi seperti komputer dan peralatan pendukung lainnya dan juga perangkat lunak (*software*).<sup>8</sup>

Sistem informasi akuntansi harus diselesaikan dengan menggunakan komputer agar pengelolaan keuangan desa selanjutnya menjadi menarik dan mahir, hal ini sesuai dengan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang mengkaji kualitas subjektif dari laporan keuangan, khususnya signifikan, dapat diandalkan, dapat dipertanggungjawabkan. dan setara.<sup>9</sup> Tentunya untuk menghasilkan sebuah laporan yang andal perlu dibutuhkan komponen sistem informasi akuntansi yang baik pula.

Salah satu Kantor Desa yang melakukan pencatatan administrasi keuangan melalui komputer adalah Kantor Desa Mutang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah (*terlampir*). Oleh karena itu, kehadiran pembukuan modern (komputerisasi) yang diselesaikan oleh desa secara positif sangat akomodatif dalam mengawasi dana desa dan bekerja dengan penyebaran informasi keuangan ke masyarakat..

Saat ini masih banyak Pemerintah Desa yang tidak peduli dengan kerangka data pembukuan, begitu juga dengan Pemerintah Kota Binanga Dua dalam mengatur administrasi keuangan kota. Mengingat hasil pertemuan dengan salah satu pegawai kantor desa Binanga Dua, sebenarnya mereka memanfaatkan media untuk menyimpan dan mengawasi informasi keuangan secara fisik, terbukti dengan masih sedikitnya pencatatan keuangan desa.

---

<sup>7</sup>Siti Zulfah, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Lingkungan (Studi Kasus Kelurahan Siti Rejo I Medan)," *Buletin Utama Teknik* 13, no. 2 (2018).

<sup>8</sup>Nabilah Purba, Mhd Yahya, and Nurbaiti, "Revolusi Industri 4.0 Peran Teknologi Dalam Eksistensi Penguasaan Bisnis Dan Implementasinya," *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis* 9, no. 2 (2021): 91–98.

<sup>9</sup>Ikatan Akuntan Indonesia, *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK)*, DSAK IAI, 2019.

Pembayaran dan dicatat menggunakan buku catatan harian, sehingga sistem data pembukuan selanjutnya masih belum efektif dan efisien. Selain itu pelatihan mengenai tata kelola keuanganpun masih sangat minim terlaksana, hal demikian terjadi akibat kurangnya perhatian dan minat para perangkat desa dalam bidang pengelolaan keuangan.<sup>10</sup>

Demikian juga dengan belum adanya informasi SDM pada kerangka data pembukuan di kantor kelurahan Binanga Dua membuat administrasi keuangan di kantor desa masih belum optimal, hal ini dikarenakan sebagian dari perangkat desa yang hanya berasal dari lulusan SLTA. sehingga masih minimnya pengetahuan terhadap sistem informasi akuntansi pengeleloaian keuangan Desa.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Nama Pegawai di Kantor Desa Binanga Dua**

No	Nama	Jabatan	Tamatan
1	Anton Sujarwo, S.Pd	Penanggungjawab Kepala Desa	Sarjana
2	Imam Basori	Sekretaris Desa	Sarjana
3	Nani Nurjannah	Kaur Pemerintahan	SMK
4	Mujjarseh	Kaur Pembangunan	SMK
5	Erlina Astuti	Kaur Umum	Sarjana
6	Sukiman	Kaur Kesra	SMA
7	Saddam Husein Siregar	Kaur Keuangan	SMA
8	Simadona	Operator	SMA

Sumber: Kantor Desa Binanga Dua Kab. Labuhanbatu Selatan

Dari tabel di atas cenderung terlihat bahwa tipikal pekerja yang bekerja di kantor desa Binanga Dua adalah lulusan sekolah menengah, sehingga dapat dikatakan bahwa informasi perwakilan tentang sistem keuangan akuntansi pembukuan masih sangat kurang.. Sebagai pihak yang menyetujui untuk mengarahkan strategi desa, pemerintah daerah adalah awal dari kemajuan, sehingga penting untuk membangun kemampuan untuk memiliki pilihan untuk mengkoordinasikan pilihan berbasis informasi jaringan yang mendukung secara emosional, mengawasi media sebagai distribusi data dan selanjutnya meningkatkan kemampuan berakuntansi. Pemakaian dan pengolahan sistem

---

<sup>10</sup>I.B, *Wawancara* (2021).

informasi akuntansi ditujukan untuk memurahkan pemerintah daerah dalam mengatur, mengontrol data dalam jumlah besar, membatasi kesalahan dan menjaga konsistensi secara bersamaan. Kerangka data moneter kota, yang tersusun dari sistem informasi pemilahan data yang telah berjalan di kota, membuat suatu struktur yang menghubungkan data-data tersebut dengan dewan arus Musrenbang. Hal ini telah diperintahkan dalam UU no. 6/2014 dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Penataan Desa.<sup>11</sup>

Sistem informasi akuntansi dijalankan untuk bekerja sama dalam mengawasi dana desa sehingga informasinya tepat dan tidak ada asumsi yang salah. Bagaimanapun, meskipun secara umum diketahui manfaat yang disajikan oleh teknologi informasi, pelaksanaan teknologi informasi tidak sederhana. Selain itu, apabila teknologi informasi saat ini tidak atau belum memiliki pilihan untuk digunakan secara ideal, pelaksanaan teknologi tidak akan ada habisnya.<sup>12</sup> Hambatan ini mungkin menjadi pertimbangan pemanfaatan teknologi informasi di organisasi pemerintah tidak ideal. Jadi penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah eksplorasi dengan mengambil judul *“Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Pada Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Binanga Dua, Kabupaten Labuhanbatu Selatan”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan keuangan di Kantor Pemerintah Desa Binanga Dua Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana permasalahan/kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan keuangan Kantor Pemerintah Desa Binanga Dua Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

---

<sup>11</sup>Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Desa.

<sup>12</sup>I Gusti Ayu Ratih Permata Dewi And Putu Diah Putri Idawati, “Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Sia) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kota Denpasar,” *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi* 12, No. 2 (2021).

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan keuangan di Kantor Pemerintah Desa Binanga Dua Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sistem informasi akuntansi pada pengelolaan keuangan Kantor Pemerintah Desa Binanga Dua Kabupaten Labuhanbatu Selatan?.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Untuk Penulis**

Penelitian ini dipercaya untuk dijadikan prasyarat oleh penulis guna mendapatkan sertifikasi empat tahun di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Apalagi dengan penyusunan proposal ini dipercaya akan berguna untuk penambahan pemahaman dan informasi, terkhusus bagi penulis, dan individu-individu yang terlibat..

#### **b. Untuk Pemerintah Desa**

Penelitian ini merupakan informasi yang dapat digunakan untuk peningkatan dalam bekerja pada penggunaan kerangka data pembukuan dalam administrasi keuangan desa.

#### **c. Untuk Akademik**

Penelitian ini diharapkan memiliki pilihan untuk berkontribusi dalam disiplin pembukuan dan dapat menjadi referensi untuk eksplorasi tambahan dan korelasi untuk eksplorasi tambahan terkait dengan sistem informasi akuntansi.

#### **d. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dipercaya mampu memberikan data dan informasi yang berharga serta memperbanyak pengetahuan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan.

